
FORMAT KAMPANYE KONSTRUKTIF DEBAT TERBUKA PADA PILKADA JAWA BARAT 2018

Hanafi

Fakultas Komunikasi dan Desain, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
email : hn.hanafi@unibi.ac.id

Abstrak

Pilkada Jabar 2018 menyisakan waktu kurang dari satu semester kedepan. Pesta demokrasi untuk memilih para elit nomor satu daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) se Jawa Barat periode 2018 – 2023 ini, akan berlangsung pada sekitar pertengahan 2018 mendatang. Mengingat nilai strategis dan pentingnya ajang politik ini bagi masa depan Jawa Barat sendiri, dibutuhkan sebuah format yang konstruktif dalam kampanye para calon, khususnya melalui kampanye debat terbuka. Calon mana yang terpilih nantinya yang akan membawa Jawa Barat menjemput masa depan lima tahunnya. Makalah ini bertujuan untuk menemukan, dan mengetahui berbagai data atau informasi mengenai format konstruktif kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018, sehingga ditemukan dan diperoleh gambaran mengenai format konstruktif itu sendiri secara jelas.

Adapun dalam bagian pembahasan diperoleh hasil yang dapat dijelaskan yakni: Pertama, Isi/Substansi pokok dalam kampanye debat terbuka pada Pilkada 2018 nanti, selayaknya berkisar tentang hal dan urusan pokok yang membumi dan sesuai jatidiri dan karakteristik Jawa Barat. Kedua, Periodisasi pelaksanaan kampanye debat terbuka ini, secara garis besar berisikan tiga (3) tahap, yaitu tahap I, II, dan III. Tahapan ini untuk mengukur keterkaitan kuat antara profil, prestasi, kompetensi, dan wawasan para calon dengan jatidiri kedaerahan serta loyalitas ke Jawa Baratan mereka; kesinambungannya dengan perencanaan program dan kebijakan yang dirancang para calon; dan menguji kemampuan para calon dalam membawa nilai positioning dan harkat Jawa Barat di tingkat nasional bahkan internasional. Ketiga, Kemasan dan setting, kampanye debat terbuka Pilkada Jabar 2018 sebaiknya diukur dengan batasan-batasan nilai sopan-santun masyarakat, nilai etis kedaerahan serta kearifan local yang senantiasa diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat pasundan yang religius.

Kata kunci : kampanye, pilkada

Abstract

The elections of West Java 2018 live more or less one in the future. The democracy party to select the elites number one area (Governor and Regent / Mayor) in West Java period 2018 - 2023, will take place around the next pertaining to 2018. Given the strategic importance and importance of this political arena for the future of West Java itself, a constructive format is needed in the campaign of candidates, especially through open debate campaigns. Which candidate will be chosen to bring West Java to fetch their future five years.

This paper aims to find and find out various data or information about constructive open debate campaign format in the elections of Jabar 2018.

As for the discussion section, the following results can be explained: - The main content / substance in the open debate campaign in the 2018 election later, should be about Things and basic business that is grounded and according to the identity and characteristics of West Java. - Periodization of the implementation of this open debate campaign, outline contains three (3) stages, namely stages I, II, and III. That should measure the strong linkages between the profiles, achievements, competencies, and insights of the candidates with their regional identity and loyalty to their Java Baratan; Sustainability through planning programs and policies designed by candidates, and testing the ability of candidates to bring value positioning and West Java's dignity at national and

even international level. - Packaging and setting, open debate campaign elections Jabar 2018 election should be measured by the boundaries of the values of public courtesy, ethical regional values and local wisdom that is always passed down through generations in the community pasundan religious.

Key word : *campaign, the electios*

1. PENDAHULUAN

Pesta Demokrasi Politik masyarakat Jawa Barat dalam hal ini pemilihan kepala daerah tinggal lebih kurang satu tahun lagi. Pesta demokrasi untuk memilih para elit nomor satu daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) se Jawa Barat periode 2018 – 2023 ini, akan berlangsung pada sekitar pertengahan 2018 mendatang. Terkait khususnya Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 (selanjutnya disebut Pilgub Jawa Barat 2018) akan dilaksanakan pada Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018–2023. Ini merupakan pemilihan kepada daerah ketiga bagi Jawa Barat yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan periode ini dimundurkan dari periode sebelumnya karena mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018. Pihak KPUD Jawa Barat belum mengeluarkan jadwal defenitif mengenai tahapan Pilkada tersebut. Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 20 kursi atau lebih di DPRD Jawa Barat yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya.

Pilgub Jabar 2018 menjadi pagelaran politik penting kedua setelah Pilkada DKI Jakarta usai. Betapa tidak jika yang akan digelar nanti adalah pemilihan kepala daerah di wilayah Propinsi yang dipahami merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan wilayah ibukota negara, Jakarta. Kenyataan ini langsung atau tidak langsung secara geopolitik, dapat menjadikan peristiwa politik Pilkada

khususnya Pilgub Jabar 2018 menjadi model kedua setelah Pilgub DKI Jakarta yang bakal menjadi barometer penting dalam mengukur stabilitas dan dinamika politik tingkat nasional di Indonesia. Keberlangsungan Pilkada Jabar 2018 sebagai sebuah peristiwa politik kewilayahan dalam kerangka Negara Kesatuan RI menjadi realitas penting. Hal ini mengingat bahwa situasi dan kondisi Propinsi Jabar dari sisi geografis, latar belakang sejarah dan dinamika sosio-politiknya memiliki beberapa kekhasan. Secara geopolitik dan geostrategis, wilayah Propinsi Jabar langsung berbatasan dengan wilayah Propinsi DKI Jakarta, membawa akibat kedinamisan tersendiri yang berdampak luas di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Kenyataan ini mendorong keterkatan yang signifikan bagi konstalasi politik Jawa Barat di tengah konstelasi politik nasional. seperti dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan dan dinamika social politik masyarakat Jabar, terutama sejak reformasi bergulir hampir dua decade ini.

Berbagai ulasan, liputan dan diskusi publik, mulai menghangat dan ramai dikemas dalam kerangka ikut menyoroti ajang perpolitikan Jabar 2018. Wacana pokok di samping terkait dengan nama-nama yang diperkirakan akan tampil sebagai kontestan Pilkada, secara khusus Pilgub Jabar, termasuk di dalamnya juga menyoroti dan menganalisis seputar isu, strategi, kiat, dan aktivitas parpol-parpol pendukung dalam mengusung calon-calon yang mereka jagokan. Fenomena ini misalnya, seperti dirilis oleh beberapa lembaga seperti Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI), dan Citra Survei Indonesia (CSI), yang laporannya menyebutkan beberapa figur yang mereka anggap kuat dan akan masuk ke bursa bakal calon gubernur Jawa Barat periode 2018-2023.

Dalam Pilkada Jawa Barat 2018, PKKPI dan CSI mencatat sejumlah nama dan ada nama kuat dalam calon tersebut. Rilis PKKPI dan CSI ini adalah hanya pantauan, belum hasil survei," kata analis dan pengamat politik dari PKKPI, Munanto dalam siaran persnya di Jakarta. Figur seperti Deddy Mizwar (Wagub Jabar aktif), Deddy Mulyadi (Bupati Purwakarta aktif), Dede Yusuf (anggota DPRRI dan mantan Wagub Jabar), Desi Ratnasari (artis dan politisi), Iwa Kartiwa (Sekda Profinsi Jabar), Nurul Arifin (artis dan anggota DPR RI, kader Partai Golkar), Netty Herawaty (istri Gubernur Jabar, Aher), Ridwan Kamil (Walikota Bandung aktif), Rieke Dyah Pitaloka (artis dan anggota DPR RI, kader PDI-P), mulai muncul di permukaan. Tentu saja nama-nama ini secara formal masih harus melalui berbagai tahapan dan seleksi politik yang cukup panjang, sebelum saatnya nanti dikukuhkan secara resmi oleh KPU Jabar.

Ulasan lainnya menyongsong berlangsungnya Pilkada Jabar 2018, muncul dari pemberitaan "AntaraNews", menyangkut para calon gubernur Jabar misalnya, sejumlah informasi media melaporkan bahwa, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, menyatakan sudah mendapat dukungan dari Partai Gerindra untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Dukungan itu ia dapat saat menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Gerindra Jawa Barat, di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (1/5/2017) malam lalu. Ia hadir mewakili Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada acara tersebut. "Tiba-tiba dari Rapimda tadi seluruh DPC dan DPD beri dukungan ke saya," kata Deddy, saat dihubungi, Selasa (2/5/2017). Namun kata Deddy, dukungan yang diberikan itu belum resmi menjadi sikap partai. Karena menurutnya masih harus dibahas lagi. "Keputusan di ketua umum. Tadi ngobrol sama Ketua Umum (Prabowo) enggak ada masalah, tinggal nunggu waktu saja," kata dia. Menurut Deddy, pihaknya sangat menyambut baik dukungan yang diberikan Partai Gerindra tersebut. "Alhamdulillah kalau emang (dukungan) ini hak kita, mudah-mudahan dikasi kemudahan jalannya. Yang penting bersama-sama dengan partai ada koalisi dan

punya tujuan yang sama," katanya. Apalagi menurutnya Partai Gerindra tidak memberikan syarat apapun untuk mau diusung oleh Partai Gerindra. Yang penting bisa berbuat untuk kemajuan Jawa Barat. "Enggak ada syarat satu, dua, tiga. Yang penting bisa berbuat untuk Jawa Barat," ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kader dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra Jawa Barat Bucky Wikagoe membenarkan adanya dukungan terhadap Deddy Mizwar. Namun bukan sikap resmi dari Partai Gerindra. Pasalnya dari hasil Rapimda DPD Partai Gerindra Jabar Senin lalu, secara bulat Partai Gerindra mendukung Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi maju di Pilgub Jabar 2018 menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. "Saat itu spontan peserta rapimda mengutarakan dukungan agar Pak Demiz (Deddy Mizwar) bisa berpasangan dengan Pak Mulyadi yang bulat diusung calon gubernur atau wakil gubernur di Pilgub Jabar 2018 oleh Partai Gerindra," ujarnya.

Terkait wacana mengenai para calon lainnya muncul dari analis dan pengamat politik dari PKKPI, Munanto. Ia mengatakan bahwa, Pilkada Jabar meskipun masih setahun lagi, tetapi pesta demokrasi di provinsi itu dipastikan akan ramai setelah Pilkada DKI Jakarta. Ia menyatakan bahwa ada politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB. Hasanudin mempunyai karakter kuat, tegas, dan berani. "Betul banyak tokoh di Jabar, tetapi saya lihat nama TB Hasanudin sudah dikenal, saya lihat juga dia tegas. Cuma apa dia akan dipilih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atau tidak pada 2018 nanti? Kalau saya melihat dia memang sudah teruji dan paham masalah polhukam selain saat ini dia duduk di Komisi I DPR RI dan harus dicatat dia juga vokal mengenai kebenaran," tuturnya. Lebih lanjut, menurut Munanto yang jelas Pilkada Jabar berbeda dengan DKI Jakarta karena di Jabar harus menggunakan strategi kampanye yang membumi. "Selain luas wilayah, Jabar unik dalam pilkada. Kita dapat belajar banyak dari munculnya nama Ahmad Heryawan (Aher) yang pada awal-awal 'kan tak disangka, tetapi bisa mengalahkan yang lain, hanya karena dalam jabatan periode

pertamanya menggandeng artis Dede Yusuf atau pada saat maju untuk jabatan kedua kali, Aher juga muncul dan menang lagi karena menggandeng Dedy Mizwar," tuturnya.

Mengenai teknis pelaksanaan Pilkada Jabar 2018, pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Jabar, menyiapkan dan menyusun agenda dan tahapan Pilkada sesuai peraturan perundangan yang berlaku. sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pilkada. Sebagai amanat konstitusi dan tugas profesionalnya sebagai lembaga independen, Pilkada Jabar 2018 selajaknya diselenggarakan oleh KPUD Jabar untuk menghasilkan para kepala daerah secara demokratis, konstitusional, taat azas semata demi kemajuan Jawa Barat. Hal yang penting di tahapan awal Pilkada salah satunya adalah memperkenalkan dan menampilkan sosok para calon yang akan berlaga nanti di publik Jawa Barat secara transparan. Langkah ke arah ini bisa secara sistemik diawali dengan tahapan pengumuman resmi para calon, kampanye dan debat terbuka, maupun uji public lainnya. Untuk memenuhi tujuan inilah dibutuhkan sebuah konsep yang aplikatif sebagai format konstruktif dalam pagelaran kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018. Melalui sarana kampanye debat terbuka inilah, unjuk kompetensi serta kelayakan diri para calon, secara terbuka dapat digelar. Untuk itu dibutuhkan sebuah format yang konstruktif dalam kampanye debat terbuka para calon, yang selanjutnya akan diuraikan dalam makalah ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta dan fenomena yang diuraikan dalam latar belakang di atas, dapat disajikan perumusan masalah sebagai berikut. "Bagaimanakah format konstruktif kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018?"

Identifikasi

Dari rumusan masalah, selanjutnya diidentifikasi permasalahan, sebagai berikut:

- a) Bagaimana gambaran **Isi dan substansi pokok materi** format konstruktif kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018?

- b) Bagaimana gambaran **Periodisasi pelaksanaan** format konstruktif kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018?

- c) Bagaimana gambaran **Kemasan dan seting** format konstruktif kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018?

Tujuan

Makalah ini disusun untuk mencari, menemukan, dan mengetahui berbagai data atau informasi mengenai format konstruktif kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018. Adapun secara rinci memiliki tujuan antara lain:

- 1) Untuk mengetahui gambaran **Isi dan substansi pokok materi** format konstruktif kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018.
- 2) Untuk mengetahui gambaran **Periodisasi pelaksanaan** format konstruktif kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018.
- 3) Untuk mengetahui gambaran **Kemasan dan seting** format konstruktif kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemilihan kepala daerah di Indonesia, pada dasarnya merupakan sebuah proses politik demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Wujud pelaksanaannya tak lain dikenal dengan istilah pemilihan umum atau "*the election*" (Budiardjo, 1986). Pilkada ini dilakukan oleh seluruh warga masyarakat daerah sebagai pemilih sesuai persyaratan yang ditentukan, dengan tujuan untuk memilih para kepala daerah dengan cara mencoblos/mencontreng foto salah satu kontestan (UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pilkada serta Juklak/Juknis KPU, Pilkada, 2013). Proses Pilkada, sebagaimana halnya proses pemilu lain pada umumnya, melalui tahap sosialisasi dan perkenalan para calon yang di kenal dengan kampanye. Kampanye sebagai ajang mempererat hubungan dan keterkaitan politis antara para calon kontestan dengan masyarakat pemilih, melalui

pengenalan profil, visi misi dan program yang ditawarkannya (Budiardjo dan Isjwara, 1988).

Terkait khusus Pilkada Jabar 2018, KPU menetapkan 16 kabupaten/kota ikut sebagai peserta Pilkada Jabar yang digelar serentak pada tahun 2018. Pelaksanaan Pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar juga bersamaan dengan digelarnya Pilkada Gubernur Jabar pada tahun itu. Berdasarkan data ada 13 kabupaten/kota yang akhir masa jabatan (AMJ) habis pada tahun 2018. Dan 4 kabupaten/kota yang dimajukan Pilkadanya meski AMJ berakhir pada 2019 nanti. Pilkada Jabar 2018 juga bersamaan dengan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2018 lebih dominan di Pilkada serentak 2018 di Jabar. Pilkada Jabar 2018 diagendakan akan digelar pada bulan Juni tahun 2018. Sebagaimana Pilkada lainnya, beberapa kebijakan KPU terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan disamakan dengan DPT yang nanti digunakan pada Pilgub Jabar 2018. Tahapan Pilkada Jabar 2018 dilakukan secara bersamaan di 16 kabupaten/kota di Jabar (detikNews, reportase berita, 2017)

Di Pilkada Jabar 2018 KPU menggunakan mekanisme pemilihan yang dilakukan hanya satu putaran. Artinya pemenang suara terbanyak akan langsung dinyatakan lolos sebagai pemenang Pilkada. Di sisi lain informasi terbaru di Pilkada serentak 2018 juga KPU tidak menetapkan batasan perolehan suara yang mengakibatkan pemilihan diputar dua kali, artinya tidak ada batasan minimal dimana pasangan calon dapat dinyatakan ikut di putaran berikutnya karena tidak ada putaran kedua. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyaklah yang nanti ditetapkan sebagai pemenang. Di sisi lain KPU juga mengatur tentang mekanisme sosialisasi pasangan calon yang maju di Pilkada, dimana seluruh biaya sosialisasi ditanggung oleh pemerintah melalui KPU. Misalnya saja untuk biaya atribut dan juga sosialisasi pasangan calon. Namun demikian pasangan calon tetap mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi sebagaimana jadwal tahapan Pilkada serentak tahun 2018. Penghematan anggaran pemilu di Pilkada serentak tahun 2018 dengan

memanfaatkan DPT bersama yang itu juga digunakan pada Pilgub Jabar 2018. Artinya kemungkinan untuk biaya pemutakhiran data dapat diminimalisir dan menekan biaya pengeluaran pemerintah. Peserta Pilkada Jabar tahun 2018 jumlahnya lebih banyak ketimbang Pilkada Jabar di tahun 2017 yang hanya diikuti oleh tiga kabupaten/kota yaitu, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi. Berikut ini daftar kabupaten/kota peserta Pilkada Jabar 2018: 1. Kota Bandung, 2. Kota Bogor (AMJ 2019), 3. Kota Cirebon, 4. Kota Sukabumi, 5. Kota Banjar, 6. Kota Bekasi, 7. Kabupaten Bogor, 8. Kabupaten Purwakarta, 9. Kabupaten Sumedang, 10. Kabupaten Subang, 11. Kabupaten Bandung Barat, 12. Kabupaten Kuningan, 13. Kabupaten Majalengka, 14. Kabupaten Cirebon (AMJ 2019), 15. Kabupaten Garut (AMJ 2019), 16. Kabupaten Ciamis (AMJ 2019). (Posted by Citizen Jurnalisme, 2017)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan dan dibahas mengenai gambaran terkait format kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018, sebagai berikut:

Isi/Substansi pokok dalam kampanye debat terbuka pada Pilkada 2018 nanti, selayaknya berkisar tentang hal dan urusan pokok yang membumi dan sesuai jatidiri dan karakteristik Jawa Barat. Tentunya tema-tema ini diangkat melalui analisis, kajian, dan penelitian para ahli yang adopsi KPUD Jawa Barat. Persoalan seperti kesejahteraan, kemajuan, keadilan masyarakat di bidang ideology, politik, ekonomi, social budaya dan hankam yang khas Jawa Barat, seharusnya mampu menggali kompetensi dan wawasan para calon dalam visi-misi dan program-program kebijakan mereka. Kampanye debat khas Jawa Barat yang membumi ini, dalam arti bermaslahat bagi keseimbangan material dan spiritual, berbasis budaya dan kearifan lokal serta penuh dengan keindahan dan seni bersyukur masyarakatnya. Program pro rakyat seperti ekonomi kerakyatan (home industry sesuai potensi dan keunggulan masing-masing daerah) dengan bantuan dan kredit ringan untuk mendorong masyarakat wirausaha;

pendidikan yang murah dan berkeadilan di seluruh pelosok wilayah, akses transportasi yang merata, layak, dan mudah; pelestarian dan pemberdayaan sumber alam dan potensi wisata daerah; program untuk penggalan, pelestarian, sosialisasi dan promosi, serta pemberdayaan nilai-nilai seni, budaya, serta kearifan local di semua daerah Jawa Barat. Isi dan substansi dalam kampanye debat terbuka, sepantasnya bukan hanya bermuatan pesan-pesan dan informasi politik bagi para calon dan parpol pengusungnya, yang dipenuhi taktik pragmatisme politik semata, akan tetapi juga melibatkan atensi, sentimen dan kepentingan menyeluruh masyarakat Jawa Barat yang religious, luhur dan lineuwih secara etis dan budaya. Realitas kampanye debat terbuka, seharusnya berisi tema-tema yang mengundang animo serta perhatian masyarakat luas, serta melibatkan semua pihak dan stake-holder Jabar dalam niat tulus dan kebersamaan menghadirkan wahana bagi kelahiran pemimpin jabar yang amanah dan maslahat bagi semuanya. Jabar akan menyeleksi dan memilih elit utamanya, elit mana yang nantinya akan menjadi orang nomor satu di tanah pasundan yang diharapkan bukan hanya akan melanjutkan estafet pemerintahan di Jawa Barat lima tahun kedepan, akan tetapi juga mampu membawa Jawa Barat semakin maju sesuai ungkapan lokal “motekar tur nanjeur” dalam kancah perpolitikan nasional di nusantara.

- **Mengenai tahapan dan periodisasi pelaksanaan kampanye debat terbuka ini,** secara garis besar berisikan tiga (3) tahap, yaitu tahap I, II, dan III. Tahap I harus mengukur keterkaitan kuat antara profil, prestasi, kompetensi, dan wawasan para calon dengan jatidiri kedaerahan serta loyalitas ke Jawa Barat mereka; Pada Tahap II yakni menggali dan mengukur nilai dan hasil dari tahap I apakah bisa terimplementasikan secara nyata dan berkesinambungan melalui perencanaan program dan kebijakan yang dirancang para calon. Pada tahap akhir (III), harus dapat mengukur dan menguji kemampuan para calon dalam membawa nilai positioning dan

harkat Jawa Barat di tingkat nasional bahkan internasional.

- **Dari sisi kemasan dan setting, kampanye debat terbuka Pilkada Jabar 2018** sebaiknya diukur dengan batasan-batasan nilai sopan-santun masyarakat, nilai etis kedaerahan serta kearifan local yang senantiasa diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat pasundan yang religious. Dalam atraksi kampanye debat terbuka, para calon dan pendukung tidak saling mencemooh, menghina, memfitnah dan menghindari kebohongan public dan adu argument yang miskin makna kemaslahatan serta menghindari ucp dan tindak madharat, ketika berhadapan dengan kontestan lain.

4. KESIMPULAN

Dengan sebuah format konstruktif kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018, yang dirancang dengan model tahapan I (substansi materi pokok), tahapan II (Periodisasi pelaksanaan kegiatan kampanye debat), dan tahap III (kemasan dan setting debat), masyarakat pemilih Jawa Barat dapat menggali informasi dan menilai kompetensi para calon pemimpinnya berdasarkan kriteria keunggulan kepemimpinan, serta menakar komitmen dalam tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin yang amanah dan menjunjung nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal tatar parahyangan. Dipihak lainnya format kampanye seperti ini akan terhindar dari subjektivitas dan pragmatisme politik para calon. Dengan demikian kesalahan masyarakat dalam memilih pemimpinnya, karena alasan para calon tidak populer atau miskin publisitas sehingga tak mampu menunjukkan kompetensi, wawasan, kemampuan diri maupun visi-misi mereka, akan dapat diminimalisasi.

Dalam konteks kehidupan demokrasi terkait Pilkada Jawa Barat 2018, komitmen dan tanggungjawab masyarakat Jawa Barat akan diuji secara sosio-politik maupun etis-normatif. Berhasilkah Jawa Barat membuktikan diri mereka selaku masyarakat yang kondusif,

demokratis, partisipatif, dewasa dan berperadaban? Peristiwa politik 2018 nanti sedikit banyak membawa Atmosfir yang akan melahirkan situasi-kondisi kepolitikan penting. Misalnya terkait komunikasi politik akan ada terpaan informasi/pesan-pesan politik yang tidak sehat, saling curiga dan *miss understanding*, misalnya *black campaign*, transaksi isu tak bertanggungjawab atau potensial dalam menebar fitnah. Menghadapi hajatan politik 2018, Jawa Barat akan membuktikan resistensi dan kapabilitas sistem kepolitikannya, sebagaimana terkenal dengan situasi dan kondisi masyarakatnya yang silih asah, silih asih, dan silih asuh. Sebuah masyarakat yang “gemah ripah wibawa mukti” dan dilandasi kepemilikan kultur santun, ramah, patuh dan toleran terhadap siapapun. Sebagai saran, hasil dan bahasan makalah ini hendaknya menjadi pertimbangan dan bahan kajian selanjutnya bagi pihak-pihak terkait aktivitas kepolitikan di Jawa Barat, seperti lembaga ELY. Dalam skala lebih luas, juga bagi pihak dan lembaga politik lainnya pada tingkat infra maupun supra struktur politik Jawa Barat. Sehingga semua pihak yang terkait dengan dinamika kepolitikan di Jawa Barat akan menyajikan dan menampilkan atraksi politik secara berbobot, penuh nilai etis budaya dan kearifan lokal, menuju Jabar yang berperadaban, insha Allah.

5. REFERENSI

Buku

- Budiardjo, Miriam, 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Cangara, Hafied, 2009. *Komunikasi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firmanzah, 2011. *Mengelola Partai Politik*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhtadi, Asep Saeful, 2008. *Komunikasi Politik Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nimmo, Dan, 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*, Goodyear Publishing Company, Santa Monica Cal.

Sumber lainnya

- Muhtadi, Asep S. dan Azis Taufik Hirzi. 2017. *Manajemen & Etika Komunikasi Politik. Seminar Perkuliahan, Semester II*,

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Komunikasi Politik, UNISBA, Bandung.

- Taufik Hirzi, Azis, 2017. *Kampanye dan Pemasaran Politik*”, Materi Perkuliahan, semester III, *Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Komunikasi Politik, UNISBA, Bandung*

